

Dari Kemiskinan Menuju Kemandirian: Dimensi Sosial Pemulihan Ekonomi Indonesia

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD

www.rudyct.com/cv.pdf

Institut Bisnis dan Multimedia (IBM ASMI)

Agustus 2026

Dari Kemiskinan Menuju Kemandirian

Dimensi Sosial Pemulihan Ekonomi Indonesia



1

Perlindungan Sosial

bantuan yang tepat sasaran bagi kelompok rentan



2

Pekerjaan Berkualitas

lapangan kerja produktif dan pendapatan yang layak



3

Pendidikan & Keterampilan

human capital untuk mobilitas sosial jangka panjang



4

UMKM & Kemandirian Usaha

akses pembiayaan, pasar, dan digitalisasi



5

Pemerataan Wilayah

desa, kota, dan daerah tertinggal tumbuh bersama



Oleh:

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD



www.rudycr.com/cv.pdf



IBM-ASMI (Institut Bisnis dan Multimedia)

“Pemulihan ekonomi tidak cukup hanya menurunkan kemiskinan, tetapi harus **membangun kemandirian.**”



Menuju Indonesia yang lebih adil, tangguh, dan mandiri.

Abstrak

Pemulihan ekonomi tidak cukup diukur dari kembalinya pertumbuhan produk domestik bruto, membaiknya investasi, atau pulihnya konsumsi agregat. Bagi Indonesia, kualitas pemulihan harus dinilai dari kemampuannya mengurangi kemiskinan, memperkecil kerentanan, memperluas pekerjaan yang layak, meningkatkan akses terhadap layanan dasar, dan pada akhirnya memungkinkan rumah tangga membangun kemandirian ekonomi. Artikel ini membahas dimensi sosial pemulihan ekonomi Indonesia melalui kerangka transisi dari kemiskinan menuju kemandirian. Kemiskinan dipahami bukan hanya sebagai kekurangan pendapatan, tetapi sebagai keterbatasan kapabilitas, aset, keterampilan, jaringan, perlindungan terhadap risiko, dan daya tawar dalam pasar. Dengan menggunakan data resmi terbaru sebagai konteks, artikel menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan dan ketimpangan merupakan kemajuan penting, namun belum otomatis menghapus kerentanan. Karena itu kebijakan perlu bergerak dari orientasi bantuan yang bersifat kompensatoris menuju strategi pemberdayaan produktif yang menggabungkan perlindungan sosial adaptif, penciptaan kerja berkualitas, penguatan UMKM, pembangunan manusia, inklusi keuangan, transformasi perdesaan, digitalisasi yang inklusif, serta tata kelola berbasis data. Kemandirian bukan berarti menghilangkan peran negara, melainkan membangun kondisi agar individu, keluarga, komunitas, dan usaha rakyat memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan ekonomi, mengelola risiko, memanfaatkan peluang, dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Artikel ini mengusulkan kerangka kebijakan bertingkat dari perlindungan, pemulihan, pemberdayaan, hingga akumulasi aset sebagai jalan menuju pemulihan yang lebih adil dan tahan terhadap guncangan.

Kata Kunci: kemiskinan; kemandirian ekonomi; pemulihan ekonomi; perlindungan sosial; pekerjaan layak; UMKM; kapabilitas; ketimpangan; inklusi sosial; Indonesia

1. Pendahuluan: Pemulihan Ekonomi Harus Berujung pada Kemandirian

Setiap krisis ekonomi memperlihatkan dua wajah perekonomian. Wajah pertama tampak dalam indikator makro: pertumbuhan melambat, investasi tertahan, konsumsi rumah tangga melemah, pengangguran bertambah, dan ruang fiskal mendapat tekanan. Wajah kedua berada lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari: pekerja kehilangan jam kerja, pedagang kecil kehilangan pelanggan, keluarga mengurangi kualitas makanan, anak menunda pendidikan, rumah tangga menjual aset, dan kelompok rentan kembali jatuh ke bawah garis kemiskinan. Karena itu pemulihan ekonomi yang bermakna tidak dapat dibatasi pada pemulihan angka agregat. Pemulihan perlu diterjemahkan menjadi kemampuan masyarakat untuk kembali berdiri, memperoleh pekerjaan yang layak, memiliki pendapatan yang relatif stabil, membangun tabungan dan aset, serta menghadapi guncangan tanpa harus kembali ke kemiskinan.

Dalam konteks Indonesia, agenda ini semakin penting karena struktur sosial-ekonomi sangat beragam. Sebagian masyarakat bekerja dalam sektor formal dengan perlindungan yang relatif kuat, tetapi kelompok yang besar masih menggantungkan penghidupan pada pekerjaan informal, usaha mikro, pertanian skala kecil, jasa berproduktivitas rendah, atau kombinasi berbagai pekerjaan. Ketika terjadi gangguan, kelompok tersebut sering kali memiliki bantalan keuangan yang tipis. Mereka dapat berada sedikit di atas garis kemiskinan pada satu periode, tetapi mudah kembali jatuh ketika mengalami sakit, kehilangan pekerjaan, gagal panen, kenaikan harga pangan, atau bencana. Inilah alasan mengapa keberhasilan mengurangi kemiskinan harus dibarengi dengan strategi memperkecil kerentanan.

Data resmi menunjukkan kemajuan yang patut dicatat. BPS melaporkan bahwa persentase penduduk miskin pada September 2025 turun menjadi 8,25 persen atau sekitar 23,36 juta orang. Angka kemiskinan perdesaan masih lebih tinggi, 10,72 persen, dibandingkan perkotaan 6,60 persen. Pada periode yang sama, gini ratio menurun menjadi 0,363. Sementara itu, perekonomian Indonesia tumbuh 5,11 persen sepanjang 2025 dan pada triwulan I-2026 tumbuh 5,61 persen secara tahunan. Indikator tersebut memperlihatkan ruang optimisme, tetapi sekaligus mengingatkan bahwa jutaan penduduk masih hidup dalam kemiskinan dan jauh lebih banyak lagi berada dalam kondisi rentan. Pemulihan perlu mengubah momentum pertumbuhan menjadi mobilitas sosial yang nyata.

Gagasan utama artikel ini adalah bahwa arah kebijakan perlu bergerak dari sekadar “mengurangi kemiskinan” menuju “membangun kemandirian”. Mengurangi kemiskinan berfokus pada posisi seseorang terhadap suatu ambang pengeluaran. Membangun kemandirian menanyakan hal yang lebih luas: apakah keluarga mempunyai keterampilan yang relevan, akses kerja dan pasar, kesehatan yang memadai, kemampuan finansial, aset produktif, jaringan sosial, perlindungan dari risiko, serta daya tawar untuk merencanakan masa depan? Pertanyaan ini membawa kita dari pendekatan yang hanya mengatasi gejala menuju pendekatan yang memperkuat kapasitas.

2. Memahami Kemiskinan secara Multidimensional

Kemiskinan sering diukur melalui pendekatan moneter karena indikator pengeluaran atau pendapatan memungkinkan perbandingan yang konsisten. Namun pengalaman hidup orang miskin selalu lebih kaya dan kompleks daripada satu angka. Kekurangan penghasilan dapat berkelindan dengan rumah yang tidak layak, keterbatasan sanitasi, kualitas pendidikan yang rendah, biaya transportasi yang mahal, pekerjaan tanpa kepastian, akses digital yang lemah, kesehatan yang rentan, serta ketiadaan aset yang dapat digunakan sebagai penyangga. Karena itu perspektif multidimensional tidak menggantikan ukuran moneter, tetapi melengkapinya agar kebijakan lebih memahami sumber keterbatasan yang dihadapi rumah tangga.

Pendekatan kapabilitas yang dikembangkan Amartya Sen memberikan dasar normatif yang kuat. Kesejahteraan tidak hanya berkaitan dengan berapa banyak barang yang dimiliki, tetapi dengan kebebasan substantif untuk menjalani kehidupan yang bernilai. Dua rumah tangga dengan pengeluaran yang sama dapat memiliki tingkat kesejahteraan yang berbeda jika salah satunya harus menanggung biaya kesehatan tinggi, tinggal jauh dari fasilitas pendidikan, atau tidak memiliki akses terhadap transportasi. Dengan demikian, pemulihan ekonomi harus memperluas pilihan yang tersedia bagi masyarakat, bukan semata-mata menambah aliran pendapatan sesaat.

Konsep kemiskinan multidimensional juga menuntut kebijakan yang terintegrasi. Keluarga miskin tidak dapat sepenuhnya keluar dari kemiskinan hanya melalui satu intervensi. Pelatihan keterampilan tanpa adanya peluang kerja akan lemah hasilnya. Kredit murah tanpa akses pasar dan kemampuan manajerial dapat meningkatkan risiko utang. Bantuan tunai tanpa layanan kesehatan dan pendidikan yang memadai dapat melindungi konsumsi tetapi tidak selalu memperkuat mobilitas jangka panjang. Karena itulah strategi keluar dari kemiskinan perlu dibangun sebagai paket yang menghubungkan perlindungan, layanan dasar, produktivitas, dan akumulasi aset.

Dimensi waktu juga penting. Ada kemiskinan kronis, yaitu kondisi yang berlangsung lama dan diwariskan lintas generasi; ada pula kemiskinan transien yang muncul ketika rumah tangga terkena guncangan. Kebijakan terhadap keduanya berbeda. Kemiskinan kronis memerlukan investasi jangka panjang pada pendidikan, kesehatan, kepemilikan aset, dan akses ekonomi. Kemiskinan transien memerlukan mekanisme respons

cepat agar rumah tangga tidak menjual aset produktif atau menghentikan sekolah anak. Sistem perlindungan sosial yang baik harus mampu membedakan kebutuhan ini dan bergerak secara adaptif.

3. Dari Bantuan menuju Tangga Kemandirian

Perdebatan tentang bantuan sosial sering terjebak pada dikotomi antara “memberi bantuan” dan “mendorong kemandirian”. Dikotomi ini kurang tepat. Perlindungan sosial justru dapat menjadi fondasi kemandirian ketika dirancang untuk mencegah keluarga melakukan strategi bertahan hidup yang merusak masa depan. Ketika pendapatan hilang, bantuan tunai dapat mencegah anak putus sekolah, menjaga konsumsi pangan, mempertahankan akses kesehatan, dan menghindarkan keluarga dari penjualan aset produktif. Dengan kata lain, perlindungan sosial tidak selalu menciptakan ketergantungan; ia dapat menjaga modal manusia dan modal ekonomi agar rumah tangga memiliki kesempatan untuk bangkit.

Masalah muncul apabila kebijakan berhenti pada tahap perlindungan. Untuk keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan, rumah tangga memerlukan “tangga kemandirian”. Anak tangga pertama adalah perlindungan dasar: pangan, kesehatan, pendidikan, dan jaminan pendapatan minimum ketika terjadi guncangan. Anak tangga kedua adalah pemulihan kapasitas: pelatihan, rehabilitasi aset produktif, akses informasi, dan dukungan untuk kembali bekerja. Anak tangga ketiga adalah pemberdayaan produktif: akses pembiayaan, teknologi, pasar, jaringan usaha, dan pendampingan. Anak tangga keempat adalah akumulasi aset: tabungan, perlindungan asuransi, kepemilikan alat produksi, rumah yang layak, dan investasi pendidikan generasi berikutnya.

Konsep graduasi dari program perlindungan sosial perlu dipahami dengan hati-hati. Graduasi bukan sekadar mengeluarkan penerima dari daftar karena penghasilannya sedikit meningkat. Graduasi yang sehat terjadi ketika rumah tangga memiliki kombinasi pendapatan yang lebih stabil, aset, keterampilan, jaringan, dan perlindungan risiko. Jika keluarga dikeluarkan terlalu cepat, mereka dapat kembali jatuh ketika terjadi guncangan kecil. Karena itu indikator graduasi sebaiknya multidimensional dan mempertimbangkan keberlanjutan, bukan hanya status pada satu titik waktu.

Pendampingan menjadi faktor penting. Banyak program pemberdayaan gagal bukan karena masyarakat tidak mau berubah, tetapi karena ekosistem pendukung tidak terbentuk. Seorang pelaku usaha mikro mungkin telah menerima alat produksi, tetapi tidak menguasai pemasaran, pembukuan, sertifikasi, desain produk, atau akses platform digital. Petani dapat menerima bantuan benih, tetapi menghadapi masalah pascapanen dan harga. Pekerja mengikuti pelatihan, tetapi tidak memiliki akses penempatan kerja. Pendampingan yang terhubung dengan kebutuhan nyata membantu mengubah bantuan menjadi peningkatan kapasitas.

4. Pekerjaan Berkualitas sebagai Jembatan Utama

Jalan paling kuat dari kemiskinan menuju kemandirian adalah pekerjaan yang produktif dan layak. Dalam jangka panjang, tidak ada sistem bantuan sosial yang dapat menggantikan peran pekerjaan sebagai sumber pendapatan, identitas, pengalaman, jaringan sosial, dan akumulasi keterampilan. Namun jumlah pekerjaan saja tidak cukup. Pekerjaan dengan jam tidak menentu, produktivitas sangat rendah, pendapatan di bawah kebutuhan dasar, atau tanpa perlindungan dapat membuat seseorang tetap miskin meskipun secara statistik bekerja.

Pada Agustus 2025, BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,85 persen, dengan 146,54 juta penduduk bekerja. Rata-rata upah buruh tercatat Rp3,33 juta per bulan. Proporsi pekerja formal meningkat, tetapi struktur ketenagakerjaan Indonesia tetap menunjukkan besarnya peran sektor informal. Karena itu

agenda pemulihan sosial perlu berfokus pada kualitas pekerjaan: produktivitas, upah, stabilitas, keselamatan, kesempatan belajar, dan akses jaminan sosial. Transisi dari informal ke formal tidak harus berarti mematikan usaha kecil; yang dibutuhkan adalah membuat formalitas memberikan manfaat nyata dan biaya kepatuhan yang proporsional.

Strategi penciptaan kerja berkualitas perlu menghubungkan kebijakan industri dengan kebijakan ketenagakerjaan. Hilirisasi, ekonomi digital, manufaktur, ekonomi hijau, pariwisata, layanan kesehatan, industri kreatif, dan modernisasi pertanian dapat membuka banyak pekerjaan, tetapi manfaat sosialnya bergantung pada desain keterkaitan lokal. Insentif investasi sebaiknya tidak hanya dinilai dari nilai modal yang masuk, tetapi juga dari jumlah dan mutu pekerjaan, pengembangan pemasok lokal, transfer keterampilan, serta peluang bagi usaha kecil di sekitar rantai nilai.

Kebijakan upskilling dan reskilling juga harus berangkat dari permintaan. Pelatihan yang baik bukan yang paling banyak menghasilkan sertifikat, melainkan yang meningkatkan peluang kerja atau produktivitas. Data pasar kerja, keterlibatan industri, sistem magang, micro-credentials, dan pengakuan kompetensi dapat memperpendek jarak antara pendidikan dan pekerjaan. Bagi pekerja dewasa, pelatihan harus fleksibel dan terjangkau karena mereka tidak selalu dapat meninggalkan pekerjaan atau tanggung jawab keluarga. Di sinilah kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, politeknik, perusahaan, dan platform digital menjadi strategis.

Implikasi Manajerial

Bagi organisasi, penciptaan pekerjaan berkualitas berarti menghubungkan strategi bisnis dengan strategi sumber daya manusia. Perusahaan yang mengejar produktivitas melalui teknologi perlu menyiapkan reskilling, jalur karier, dan mekanisme transisi bagi pekerja terdampak. Pemerintah dapat mendorong praktik ini melalui insentif investasi dan pengadaan. Di tingkat daerah, forum keterampilan yang mempertemukan perusahaan, sekolah vokasi, universitas, dan dinas tenaga kerja dapat mengurangi mismatch secara lebih cepat daripada kurikulum yang hanya diperbarui secara periodik.

5. UMKM, Ekonomi Rakyat, dan Mobilitas Sosial

Usaha mikro, kecil, dan menengah memainkan peran sosial yang jauh melampaui kontribusinya terhadap aktivitas ekonomi. Bagi banyak keluarga, usaha kecil merupakan mekanisme penciptaan kerja mandiri, penyangga ketika pekerjaan formal hilang, dan sumber pendapatan yang dapat diwariskan. Namun mayoritas usaha mikro menghadapi produktivitas yang rendah, pembukuan sederhana, skala pasar terbatas, teknologi yang minim, dan akses pembiayaan yang tidak selalu sesuai dengan karakter usahanya. Karena itu penguatan UMKM harus bergeser dari sekadar memperbanyak kredit menuju peningkatan kapasitas produktif.

Kredit memang penting, tetapi kredit bukan obat untuk semua masalah. Usaha yang belum mempunyai pasar atau margin yang memadai justru dapat terbebani utang. Pendekatan yang lebih sehat menggabungkan diagnosis usaha, literasi keuangan, pembukuan, desain produk, pemasaran, standardisasi, akses logistik, pengadaan pemerintah, kemitraan dengan perusahaan, dan pembiayaan bertahap. Bagi usaha yang benar-benar mikro, hibah produktif dan tabungan kelompok kadang lebih sesuai pada tahap awal daripada pinjaman komersial.

Digitalisasi dapat memperluas pasar, tetapi juga menciptakan kompetisi baru. Masuk ke marketplace tidak otomatis meningkatkan pendapatan jika pelaku usaha tidak mampu mengelola foto produk, ulasan, promosi, biaya iklan, logistik, dan data pelanggan. Kemandirian digital berarti UMKM tidak hanya menjadi pengguna

platform, tetapi memahami ekonomi platform dan mampu mempertahankan sebagian kendali atas pelanggan, data, dan merek. Pelatihan digital perlu praktis, berbasis sektor, dan didampingi sampai perubahan benar-benar terlihat dalam proses bisnis.

Koperasi dan model kolektif juga relevan. Banyak usaha kecil terlalu kecil untuk memperoleh harga input yang baik, memenuhi pesanan besar, membeli mesin, atau melakukan ekspor secara individual. Kerja sama dapat menciptakan skala ekonomi tanpa menghilangkan kepemilikan lokal. Koperasi modern yang transparan, profesional, dan didukung sistem digital dapat menjadi institusi penghubung antara produsen kecil dengan pasar, pembiayaan, teknologi, dan layanan bisnis. Dalam kerangka ini, kemandirian bukan individualisme ekonomi, melainkan kemampuan komunitas membangun institusi yang memperkuat posisi tawar bersama.

6. Pendidikan, Kesehatan, dan Modal Manusia

Kemiskinan lintas generasi hampir selalu terkait dengan ketimpangan modal manusia. Anak yang tumbuh dengan gizi kurang, sekolah berkualitas rendah, akses digital terbatas, dan lingkungan yang tidak mendukung pembelajaran akan memasuki pasar kerja dengan pilihan yang sempit. Karena itu investasi sosial dalam pendidikan dan kesehatan bukan pengeluaran konsumtif, melainkan investasi produktivitas jangka panjang. Pemulihan ekonomi yang memotong layanan dasar demi mengejar indikator fiskal jangka pendek dapat menghasilkan biaya sosial yang jauh lebih besar pada masa depan.

Pendidikan perlu dipahami sebagai proses pembentukan kapabilitas. Selain literasi dan numerasi, generasi muda memerlukan kemampuan memecahkan masalah, berkomunikasi, bekerja sama, menggunakan teknologi, memahami data, dan belajar sepanjang hayat. Di tengah perkembangan AI dan otomatisasi, kompetensi manusia justru semakin penting pada aspek yang sulit digantikan mesin: penilaian, kreativitas, empati, koordinasi, kepemimpinan, dan pemahaman konteks. Sistem pendidikan dan pelatihan harus membantu kelompok berpendapatan rendah memperoleh kompetensi tersebut, bukan membiarkan transformasi teknologi memperlebar kesenjangan.

Kesehatan memiliki fungsi ekonomi yang sama penting. Satu episode penyakit berat dapat mengurangi penghasilan, meningkatkan pengeluaran, menjual aset, dan mendorong keluarga kembali miskin. Jaminan kesehatan yang efektif mengurangi risiko finansial, tetapi kualitas layanan, jarak, waktu tunggu, ketersediaan tenaga kesehatan, dan biaya tidak langsung tetap menentukan akses. Pemulihan sosial perlu memperkuat layanan primer, pencegahan, kesehatan ibu-anak, kesehatan mental, dan manajemen penyakit kronis karena semuanya memengaruhi produktivitas dan partisipasi kerja.

Investasi pada anak usia dini mempunyai efek kumulatif. Gizi, stimulasi, kesehatan, dan pengasuhan yang baik meningkatkan kesiapan sekolah dan kemampuan belajar. Sebaliknya, deprivasi pada fase awal sulit sepenuhnya diperbaiki pada usia dewasa. Karena itu strategi mengakhiri kemiskinan tidak boleh hanya berfokus pada kepala rumah tangga saat ini, tetapi juga pada trajectory generasi berikutnya. Kemandirian yang berkelanjutan lahir ketika anak memiliki peluang yang lebih baik daripada orang tuanya.

7. Perlindungan Sosial Adaptif dan Manajemen Risiko

Indonesia menghadapi berbagai risiko: fluktuasi harga pangan, perlambatan global, bencana hidrometeorologi, penyakit, kehilangan pekerjaan, gagal panen, perubahan teknologi, dan dampak perubahan iklim. Kelompok miskin dan rentan biasanya paling terdampak karena mempunyai tabungan lebih sedikit, aset lebih rendah, dan akses asuransi terbatas. Karena itu perlindungan sosial harus dirancang tidak hanya untuk kondisi normal, tetapi juga sebagai sistem manajemen risiko nasional.

Perlindungan sosial adaptif menghubungkan data sosial, sistem pembayaran, kesiapsiagaan bencana, dan mekanisme pembiayaan agar bantuan dapat diperluas dengan cepat ketika terjadi guncangan. Sistem yang hanya diperbarui secara periodik dapat terlambat mengenali keluarga yang baru jatuh miskin. Data dinamis, interoperabilitas antarinstansi, verifikasi yang transparan, dan kanal pengaduan diperlukan agar respons tepat sasaran. Namun penggunaan data juga harus menjaga privasi dan menghindari eksklusi digital terhadap warga yang akses teknologinya terbatas.

Desain bantuan perlu mempertimbangkan insentif tanpa mengorbankan perlindungan. Kekhawatiran mengenai ketergantungan harus dijawab dengan bukti dan desain program, bukan dengan mengurangi bantuan secara prematur. Bantuan dapat dibuat kompatibel dengan pekerjaan, misalnya melalui tapering benefit sehingga dukungan berkurang secara bertahap ketika pendapatan naik. Mekanisme ini mengurangi “jurang manfaat” ketika seseorang justru kehilangan terlalu banyak bantuan setelah menerima pekerjaan dengan tambahan pendapatan yang kecil.

Asuransi sosial juga perlu diperluas ke pekerja informal melalui skema kontribusi yang fleksibel dan insentif yang terukur. Pekerja informal sering memiliki pendapatan yang fluktuatif sehingga model iuran bulanan tetap kurang cocok. Teknologi pembayaran dapat memungkinkan kontribusi mikro yang lebih lentur. Di sisi lain, subsidi negara tetap diperlukan bagi kelompok dengan kemampuan bayar rendah. Tujuan akhirnya bukan hanya meningkatkan kepesertaan, tetapi memastikan manfaat nyata ketika risiko terjadi.

Prinsip Desain Perlindungan Sosial

- tepat waktu ketika guncangan terjadi, bukan hanya tepat sasaran secara administratif;
- dapat diperluas atau dikurangi secara adaptif sesuai kondisi;
- terintegrasi dengan layanan kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan;
- memiliki kanal luring dan daring agar tidak mengecualikan kelompok rentan;
- menyediakan mekanisme banding, koreksi data, dan perlindungan privasi.

8. Inklusi Keuangan dan Akumulasi Aset

Pendapatan membantu rumah tangga bertahan hari ini, sedangkan aset membantu mereka merencanakan hari esok. Aset dapat berbentuk tabungan, rumah, tanah, alat produksi, ternak, pendidikan, kepemilikan usaha, maupun perlindungan asuransi. Rumah tangga yang memiliki aset lebih mampu menyerap guncangan dan menangkap peluang. Sebaliknya, keluarga tanpa aset sering harus meminjam dengan biaya tinggi atau menjual sumber penghidupan ketika menghadapi keadaan darurat. Karena itu kebijakan anti-kemiskinan perlu memasukkan strategi akumulasi aset.

Inklusi keuangan tidak sama dengan membuka rekening. Rekening hanya pintu masuk. Kemandirian finansial membutuhkan kemampuan menyusun anggaran, menabung, memahami bunga dan risiko, memilih kredit yang sesuai, menggunakan pembayaran digital secara aman, serta mengenali penipuan. Produk keuangan harus dirancang sesuai pola arus kas kelompok berpendapatan rendah. Tabungan kecil yang mudah diakses, asuransi mikro, pembiayaan usaha bertahap, dan remittance berbiaya rendah dapat lebih bermanfaat daripada produk yang kompleks.

Teknologi finansial membuka peluang besar, tetapi juga risiko. Pinjaman digital dapat memperluas akses, namun biaya tinggi dan desain yang mendorong pinjaman berulang dapat memperburuk kerentanan. Data alternatif dapat memperbaiki penilaian kredit, tetapi harus disertai perlindungan data dan mekanisme

koreksi. Kebijakan inklusi keuangan yang baik menyeimbangkan inovasi dengan perlindungan konsumen. Masyarakat tidak menjadi mandiri jika akses keuangan justru membuat mereka terperangkap dalam utang.

Kepemilikan aset produktif perlu dikaitkan dengan peningkatan produktivitas. Program bantuan alat harus memastikan alat sesuai dengan kebutuhan, tersedia perawatan, dan ada pasar. Program perumahan perlu memperhitungkan lokasi terhadap pekerjaan dan layanan. Reforma agraria atau akses lahan harus dibarengi dukungan produktif dan kepastian hak. Dalam semua kasus, aset menjadi bermakna jika meningkatkan pilihan dan kapasitas menghasilkan pendapatan.

9. Desa, Pertanian, dan Pemerataan Wilayah

Kemiskinan Indonesia memiliki dimensi spasial yang kuat. Tingkat kemiskinan perdesaan masih lebih tinggi daripada perkotaan, sementara peluang ekonomi, pendidikan, kesehatan, konektivitas, dan layanan keuangan juga tidak merata. Pemulihan yang terlalu berpusat pada metropolitan berisiko memperbesar migrasi terpaksa dan kesenjangan regional. Karena itu pembangunan desa dan kota kecil perlu dipandang sebagai strategi produktivitas nasional, bukan sekadar program pemerataan.

Pertanian tetap menjadi sumber penghidupan penting bagi banyak rumah tangga. Tantangannya adalah meningkatkan nilai tambah dan stabilitas pendapatan. Modernisasi pertanian tidak hanya berarti mekanisasi, tetapi juga benih berkualitas, irigasi, penyuluhan, informasi cuaca, pembiayaan, penyimpanan, pengolahan, logistik, akses pasar, dan organisasi petani. Digitalisasi dapat membantu, tetapi teknologi harus menjawab masalah nyata. Aplikasi harga tidak banyak berguna jika petani tetap tidak memiliki fasilitas penyimpanan dan terpaksa menjual segera setelah panen.

Diversifikasi ekonomi perdesaan sangat penting. Industri pengolahan skala kecil, pariwisata berbasis komunitas, jasa perawatan, ekonomi kreatif, energi terbarukan, dan pekerjaan jarak jauh dapat mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan. Infrastruktur digital membuka peluang baru, tetapi harus didukung listrik, keterampilan, perangkat, dan ruang kerja. Ekosistem desa yang produktif dapat menahan migrasi yang semata-mata didorong keterpaksaan dan memberi generasi muda pilihan untuk membangun masa depan di daerahnya.

Kebijakan berbasis tempat perlu mengakui keragaman Indonesia. Strategi untuk wilayah pertanian subur berbeda dari pulau kecil, kawasan pesisir, daerah pertambangan, atau wilayah pegunungan. Pemerintah daerah membutuhkan ruang inovasi, tetapi juga kapasitas perencanaan, data, dan akuntabilitas. Transfer fiskal sebaiknya mendorong perbaikan hasil sosial dan pelayanan, bukan sekadar penyerapan anggaran.

10. Perempuan, Anak Muda, Disabilitas, dan Kelompok Rentan

Pemulihan ekonomi tidak otomatis inklusif. Kelompok yang menghadapi hambatan struktural dapat tertinggal meskipun ekonomi tumbuh. Perempuan, misalnya, sering memikul porsi besar pekerjaan perawatan tidak berbayar. Tanpa layanan penitipan anak, transportasi aman, fleksibilitas kerja, dan perlindungan dari diskriminasi, peluang kerja formal mereka lebih terbatas. Kebijakan ekonomi yang mengabaikan care economy akan kehilangan bagian besar potensi produktif masyarakat.

Anak muda menghadapi tantangan transisi dari pendidikan ke pekerjaan. Pengangguran muda biasanya lebih tinggi dan pengalaman awal kerja sangat menentukan trajectory pendapatan. Program magang berkualitas, informasi lowongan, bimbingan karier, pelatihan digital, dan dukungan kewirausahaan dapat mempercepat transisi. Namun kebijakan harus menghindari romantisasi kewirausahaan: tidak semua anak muda harus menjadi pengusaha. Sebagian besar tetap memerlukan pekerjaan yang stabil dan kesempatan berkembang.

Penyandang disabilitas sering menghadapi hambatan yang bukan berasal dari keterbatasan individu, melainkan lingkungan yang tidak aksesibel, stigma, transportasi, dan praktik rekrutmen. Prinsip universal design, teknologi asistif, insentif yang tepat, serta penegakan hak kerja dapat mengubah biaya eksklusif menjadi produktivitas. Program bantuan sosial bagi disabilitas tetap diperlukan, tetapi harus dapat hidup berdampingan dengan partisipasi kerja tanpa menciptakan risiko kehilangan dukungan yang terlalu cepat.

Kelompok lanjut usia, masyarakat adat, pekerja migran, dan rumah tangga di daerah rawan bencana juga membutuhkan desain yang spesifik. Inklusi bukan berarti memberikan intervensi identik kepada semua orang, melainkan memastikan setiap kelompok mempunyai akses yang adil terhadap peluang dan perlindungan. Kesetaraan substantif kadang memerlukan dukungan yang berbeda sesuai hambatan yang dihadapi.

11. Digitalisasi dan AI: Peluang serta Risiko bagi Kelompok Rentan

Transformasi digital dapat mempercepat kemandirian melalui akses informasi, pendidikan, pasar, layanan keuangan, telemedisin, dan pekerjaan baru. Bagi usaha kecil, pemasaran digital dapat memperluas jangkauan. Bagi pencari kerja, platform dapat mempertemukan keterampilan dengan peluang. Bagi pemerintah, data dapat meningkatkan ketepatan program. Namun teknologi juga dapat memperlebar kesenjangan jika perangkat, koneksi, literasi, bahasa, dan kemampuan digital tidak merata.

AI memperkuat peluang sekaligus risiko. Otomatisasi dapat meningkatkan produktivitas, tetapi sebagian pekerjaan rutin akan berubah atau berkurang. Kelompok berpendidikan rendah dapat terdampak lebih besar jika tidak tersedia jalur reskilling. Pada saat yang sama, AI dapat membantu petani memprediksi hama, membantu UMKM menyusun materi pemasaran, membantu tenaga kesehatan melakukan triase, dan membantu guru menyediakan materi adaptif. Kebijakan harus memastikan manfaat teknologi dapat diakses oleh kelompok yang biasanya terakhir memperoleh inovasi.

Penggunaan AI dalam administrasi sosial perlu menghindari bias algoritmik. Sistem penargetan yang terlalu bergantung pada data digital dapat mengecualikan warga yang “tidak terlihat” secara digital. Setiap keputusan berisiko tinggi harus memiliki jalur koreksi manusia, transparansi, audit, dan mekanisme banding. Efisiensi administratif tidak boleh mengorbankan hak warga. Prinsip human-in-the-loop penting terutama ketika keputusan menentukan akses terhadap bantuan, kesehatan, pendidikan, atau kredit.

Kemandirian digital juga memiliki dimensi kedaulatan. Institusi publik perlu memahami di mana data warga disimpan, siapa yang mengakses, dan bagaimana model digunakan. Local AI atau arsitektur hibrida dapat relevan untuk fungsi tertentu yang sensitif terhadap privasi dan latensi. Namun pilihan teknologi harus didasarkan pada kebutuhan dan kapasitas, bukan jargon. Tujuan akhir tetap sosial: memperluas kemampuan warga untuk berpartisipasi secara aman dan produktif dalam ekonomi digital.

12. Ekonomi Hijau dan Transisi yang Berkeadilan

Perubahan iklim memiliki konsekuensi sosial yang besar. Petani, nelayan, pekerja luar ruang, penduduk pesisir, dan keluarga berpendapatan rendah sering lebih rentan terhadap banjir, kekeringan, gelombang panas, perubahan musim, dan kenaikan harga pangan. Karena itu kebijakan pengentasan kemiskinan dan kebijakan iklim tidak dapat dipisahkan. Ketahanan sosial adalah bagian dari ketahanan iklim.

Transisi menuju ekonomi rendah karbon akan menciptakan pekerjaan baru pada energi terbarukan, efisiensi energi, transportasi bersih, pengelolaan sampah, restorasi ekosistem, dan teknologi hijau. Namun sebagian sektor dan daerah dapat menghadapi penyesuaian. Konsep just transition menuntut agar pekerja dan komunitas yang terdampak memperoleh pelatihan, perlindungan pendapatan, konsultasi, dan alternatif

ekonomi. Transisi yang hijau tetapi memperbesar kemiskinan bukanlah transisi yang berkelanjutan secara politik maupun sosial.

Ekonomi sirkular juga dapat menjadi ruang pemberdayaan. Pengumpulan, perbaikan, penggunaan kembali, dan daur ulang dapat menyediakan pekerjaan, tetapi kualitas kerja harus ditingkatkan. Pekerja informal pada rantai sampah perlu mendapat keselamatan kerja, akses jaminan sosial, peralatan, dan posisi tawar yang lebih baik. Formalisasi yang cerdas mengakui kontribusi mereka dan memasukkan mereka ke dalam sistem, bukan menggusur.

Di perdesaan, investasi pada pertanian tahan iklim, agroforestri, restorasi mangrove, dan energi terdesentralisasi dapat menggabungkan tujuan pendapatan dengan keberlanjutan. Skema pembayaran jasa lingkungan dan pasar karbon berpotensi membuka sumber pendapatan, tetapi tata kelola harus memastikan manfaat sampai kepada komunitas lokal dan tidak menghilangkan hak atas lahan atau sumber daya.

13. Tata Kelola, Data, dan Integrasi Kebijakan

Kemiskinan bersifat multidimensional, tetapi birokrasi sering bekerja secara sektoral. Satu keluarga dapat berinteraksi dengan program bantuan pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, pelatihan, kredit, dan administrasi kependudukan melalui institusi yang berbeda. Tanpa integrasi, program dapat tumpang tindih pada sebagian kelompok dan meninggalkan kelompok lain. Integrasi tidak harus berarti sentralisasi penuh; yang penting adalah interoperabilitas data, pembagian peran yang jelas, dan orientasi pada hasil keluarga.

Data sosial-ekonomi perlu diperbarui secara dinamis karena kondisi rumah tangga berubah. Namun ketepatan data bukan sekadar masalah teknologi. Diperlukan prosedur pendaftaran yang mudah, verifikasi lokal, mekanisme pengaduan, audit, dan perlindungan privasi. Sistem harus memungkinkan warga yang layak tetapi belum tercatat untuk masuk, sekaligus memperbaiki kesalahan secara cepat. Transparansi mengenai kriteria membantu meningkatkan kepercayaan.

Evaluasi program perlu bergerak dari indikator input menuju outcome. Banyak program dinilai dari jumlah peserta, dana terserap, atau barang dibagikan. Indikator tersebut penting untuk administrasi, tetapi tidak cukup. Pertanyaan yang lebih relevan adalah apakah pendapatan peserta meningkat, pekerjaan menjadi lebih stabil, anak tetap sekolah, aset tumbuh, utang berisiko menurun, dan ketahanan terhadap guncangan membaik. Penggunaan eksperimen, quasi-eksperimen, evaluasi proses, dan data longitudinal dapat memperkuat pembelajaran kebijakan.

Koordinasi pusat-daerah menjadi kunci karena sebagian besar layanan sosial terjadi di tingkat lokal. Pemerintah pusat dapat menetapkan standar, pendanaan, dan sistem data, sedangkan pemerintah daerah menyesuaikan implementasi dengan konteks. Desa dan komunitas dapat berperan dalam identifikasi kebutuhan dan pengawasan. Namun partisipasi lokal harus disertai mekanisme mencegah elite capture. Akuntabilitas sosial, keterbukaan anggaran, dan kanal pengaduan membantu menjaga legitimasi.

14. Kerangka Empat Tahap: Perlindungan, Pemulihan, Pemberdayaan, Akumulasi

Untuk memudahkan desain kebijakan, perjalanan dari kemiskinan menuju kemandirian dapat dipetakan dalam empat tahap. Tahap pertama adalah perlindungan. Fokusnya menjaga kebutuhan dasar dan mencegah kerusakan jangka panjang ketika pendapatan tidak mencukupi. Instrumennya dapat berupa bantuan tunai,

pangan, jaminan kesehatan, bantuan pendidikan, subsidi terarah, dan respons bencana. Ukuran keberhasilan tahap ini adalah berkurangnya deprivasi akut dan terhindarnya strategi coping yang merusak.

Tahap kedua adalah pemulihan. Setelah kondisi dasar stabil, keluarga membutuhkan dukungan untuk kembali berfungsi secara produktif. Ini dapat berupa penempatan kerja, pelatihan singkat, rehabilitasi kesehatan, pemulihan alat usaha, restrukturisasi utang yang sehat, serta dukungan psikososial. Bagi korban bencana atau PHK, fase pemulihan sangat kritis karena menentukan apakah guncangan menjadi sementara atau berubah menjadi kemiskinan jangka panjang.

Tahap ketiga adalah pemberdayaan. Fokus bergeser pada produktivitas dan posisi tawar. Program dapat menghubungkan peserta dengan pasar, kredit produktif, teknologi, koperasi, mentoring, sertifikasi, dan jaringan bisnis. Pada tahap ini pemerintah berperan sebagai penghubung ekosistem. Pemberdayaan yang efektif mengurangi kebutuhan bantuan secara alami karena kapasitas menghasilkan pendapatan meningkat.

Tahap keempat adalah akumulasi. Rumah tangga mulai membangun tabungan, asuransi, aset produktif, pendidikan lanjutan, kepemilikan rumah, dan diversifikasi pendapatan. Di sinilah kemandirian menjadi lebih tahan guncangan. Kebijakan dapat mendorong matched savings, perlindungan pensiun, akses kepemilikan aset, dan instrumen investasi sederhana. Empat tahap ini bukan garis lurus; keluarga dapat bergerak maju dan mundur. Sistem sosial harus memungkinkan dukungan kembali ketika terjadi guncangan tanpa stigma.

Matriks Sederhana Perjalanan Kemandirian

Tahap	Tujuan	Instrumen Utama	Indikator Hasil
Perlindungan	Mencegah deprivasi	Bantuan, jaminan kesehatan, pangan	Konsumsi dasar terjaga
Pemulihan	Mengembalikan fungsi produktif	Pelatihan, penempatan, pemulihan aset	Kembali bekerja/berusaha
Pemberdayaan	Menaikkan produktivitas	Pasar, teknologi, mentoring, pembiayaan	Pendapatan lebih stabil
Akumulasi	Membangun ketahanan	Tabungan, asuransi, aset, pendidikan	Risiko jatuh miskin menurun

15. Indikator Kemandirian yang Lebih Kaya

Jika tujuan kebijakan adalah kemandirian, maka keberhasilan tidak dapat diukur hanya dengan keluar dari garis kemiskinan. Diperlukan dashboard yang lebih kaya. Dimensi pertama adalah pendapatan: tingkat, stabilitas, dan diversifikasi sumber. Dimensi kedua adalah pekerjaan: produktivitas, formalitas, jaminan sosial, keselamatan, dan kesempatan berkembang. Dimensi ketiga adalah aset: tabungan, rumah, alat produksi, dan kepemilikan usaha. Dimensi keempat adalah modal manusia: kesehatan, pendidikan, keterampilan, dan literasi digital.

Dimensi kelima adalah ketahanan terhadap risiko. Apakah rumah tangga mampu membiayai kebutuhan darurat tanpa menjual aset? Apakah memiliki jaminan kesehatan dan perlindungan sosial? Dimensi keenam adalah akses: transportasi, internet, keuangan, pasar, dan layanan publik. Dimensi ketujuh adalah agency atau kemampuan mengambil keputusan. Ini sulit diukur, tetapi penting, terutama bagi perempuan dan kelompok yang mengalami diskriminasi.

Indikator tersebut sebaiknya digunakan secara diagnostik, bukan sebagai syarat administratif yang kaku. Tujuannya mengetahui jenis dukungan yang dibutuhkan keluarga. Rumah tangga dapat kuat pada satu dimensi dan lemah pada dimensi lain. Misalnya pendapatan cukup tetapi tanpa asuransi dan tabungan; atau memiliki aset tetapi pendapatan tidak stabil. Profil multidimensional memungkinkan intervensi yang lebih tepat.

Pada tingkat makro, indikator pemulihan sosial dapat mencakup penurunan kemiskinan, gini ratio, upah riil, proporsi pekerja formal, partisipasi perempuan, pengangguran muda, cakupan jaminan sosial, learning outcomes, akses kesehatan, inklusi keuangan, dan mobilitas antarwilayah. Pertumbuhan PDB tetap penting, tetapi ditempatkan sebagai salah satu instrumen untuk mencapai hasil sosial, bukan tujuan tunggal.

16. Ilustrasi Kasus: Rumah Tangga dari Rentan menjadi Mandiri

Bayangkan sebuah rumah tangga di kota kecil dengan dua anak. Kepala keluarga bekerja sebagai pengemudi harian, sementara pasangan menjual makanan rumahan. Pendapatan tidak tetap dan sebagian besar habis untuk konsumsi. Ketika salah satu anggota keluarga sakit, mereka meminjam dari sumber informal dengan bunga tinggi. Dalam ukuran statistik tertentu, keluarga ini mungkin berada sedikit di atas garis kemiskinan, tetapi secara ekonomi sangat rapuh. Satu guncangan cukup untuk mendorongnya kembali miskin.

Pada tahap perlindungan, jaminan kesehatan mengurangi risiko biaya medis dan bantuan temporer menjaga konsumsi ketika pendapatan turun. Pada tahap pemulihan, kepala keluarga memperoleh pelatihan singkat dan akses penempatan kerja yang lebih stabil. Pasangan mendapat pendampingan usaha, bukan hanya kredit: pembukuan sederhana, izin, pengemasan, dan pemasaran digital. Anak memperoleh dukungan pendidikan sehingga tidak perlu berhenti sekolah untuk membantu pendapatan keluarga.

Pada tahap pemberdayaan, usaha makanan bergabung dalam koperasi pemasaran lokal dan mendapat akses pengadaan katering. Pendapatan menjadi lebih stabil. Keluarga mulai menggunakan rekening terpisah untuk usaha dan rumah tangga, membentuk dana darurat, dan mengikuti jaminan sosial. Setelah beberapa tahun, mereka membeli peralatan produksi yang meningkatkan kapasitas dan mempekerjakan satu tetangga. Kemandirian dalam contoh ini tidak muncul dari satu bantuan, melainkan dari rangkaian intervensi yang saling memperkuat.

Ilustrasi ini menunjukkan pentingnya sekuensing. Memberikan kredit pada tahap pertama mungkin berbahaya karena arus kas belum stabil. Menghentikan bantuan segera setelah pendapatan naik juga dapat memperbesar risiko. Kebijakan yang memahami perjalanan rumah tangga akan lebih efektif daripada program yang berdiri sendiri dan menggunakan logika “satu ukuran untuk semua”.

17. Peran Perguruan Tinggi, Bisnis, dan Masyarakat Sipil

Pemerintah tidak dapat membangun kemandirian sendirian. Perguruan tinggi dapat menyediakan riset, evaluasi program, pelatihan, inkubasi usaha, dan pendampingan berbasis bukti. Kampus juga dapat menjadi laboratorium kebijakan lokal, bekerja bersama pemerintah daerah dan komunitas untuk menguji model pemberdayaan. Mahasiswa dapat terlibat melalui service learning yang terstruktur, tetapi kegiatan harus diarahkan pada hasil yang berkelanjutan, bukan sekadar kunjungan singkat.

Dunia usaha memiliki peran melalui penciptaan pekerjaan, pengembangan pemasok lokal, apprenticeship, transfer teknologi, dan praktik bisnis inklusif. Program tanggung jawab sosial perusahaan paling efektif ketika terhubung dengan rantai nilai utama perusahaan. Perusahaan makanan dapat membantu petani meningkatkan kualitas dan kepastian pembelian; perusahaan digital dapat memperluas keterampilan dan

pasar UMKM; rumah sakit dapat membangun ekosistem tenaga kesehatan lokal. Pendekatan ini menciptakan shared value antara daya saing bisnis dan kesejahteraan masyarakat.

Organisasi masyarakat sipil dan institusi keagamaan sering memiliki kedekatan dengan kelompok rentan dan memahami konteks lokal. Mereka dapat membantu menjangkau kelompok yang tidak terdata, memberikan pendampingan, memfasilitasi kepercayaan, dan mengawasi kualitas layanan. Namun kolaborasi harus menjaga transparansi dan standar perlindungan penerima. Kekuatan jaringan lokal dapat menjadi penghubung antara sistem formal dengan kehidupan sehari-hari warga.

Kemitraan yang sehat memerlukan pembagian peran. Pemerintah menetapkan hak, regulasi, dan pendanaan dasar; bisnis menciptakan aktivitas produktif; perguruan tinggi membangun pengetahuan dan keterampilan; masyarakat sipil menjaga kedekatan dan akuntabilitas sosial. Ketika aktor-aktor ini bekerja dalam silo, efeknya terbatas. Ketika mereka membangun ekosistem, peluang mobilitas sosial menjadi lebih besar.

18. Risiko Kebijakan dan Hal yang Perlu Dihindari

Pertama, kebijakan harus menghindari romantisasi kemandirian. Kemandirian bukan alasan untuk menarik negara dari tanggung jawab sosial. Bahkan masyarakat yang paling produktif tetap membutuhkan pendidikan publik, kesehatan, infrastruktur, regulasi pasar, dan perlindungan terhadap risiko sistemik. Narasi “semua orang harus mandiri” dapat menjadi tidak adil jika hambatan struktural dibiarkan. Kemandirian harus dipahami sebagai hasil dari institusi yang memungkinkan orang berkembang.

Kedua, hindari fragmentasi program. Terlalu banyak program kecil dengan syarat, basis data, dan mekanisme berbeda menciptakan biaya transaksi besar bagi penerima dan birokrasi. Konsolidasi tidak selalu berarti menghapus keragaman, tetapi menyederhanakan akses dan membangun sistem rujukan antarprogram. Warga seharusnya tidak harus menjadi ahli birokrasi untuk memperoleh haknya.

Ketiga, hindari target yang hanya mengejar jumlah penerima graduasi. Tekanan administratif untuk menurunkan daftar penerima dapat mendorong eksklusi prematur. Lebih baik mengukur stabilitas selama beberapa periode dan menyediakan jalur masuk kembali. Keempat, hindari pembiayaan produktif tanpa perlindungan konsumen. Kredit yang salah dapat mengubah masalah kemiskinan menjadi masalah utang.

Kelima, hindari digitalisasi yang memindahkan beban kepada warga. Aplikasi yang rumit, verifikasi biometrik yang sering gagal, atau layanan yang hanya tersedia daring dapat mengecualikan lansia, penyandang disabilitas, dan warga daerah terpencil. Digitalisasi harus menyediakan assisted channels dan alternatif manusia. Teknologi adalah sarana, bukan tujuan.

19. Agenda Kebijakan Indonesia 2026-2035

Dalam jangka pendek, prioritas adalah menjaga daya beli kelompok bawah, memastikan inflasi pangan terkendali, memperkuat respons sosial adaptif, dan mempercepat penempatan kerja. Data sosial harus diperbarui, mekanisme pengaduan diperkuat, dan program pelatihan diarahkan pada sektor dengan permintaan nyata. Integrasi bantuan dengan layanan kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan perlu diperluas agar keluarga tidak hanya menerima uang, tetapi memperoleh jalur menuju produktivitas.

Dalam jangka menengah, Indonesia perlu mempercepat transformasi pekerjaan informal menjadi pekerjaan yang lebih produktif dan terlindungi. Caranya bukan dengan regulasi yang memberatkan, tetapi melalui insentif formalitas, simplifikasi, jaminan sosial fleksibel, akses pembiayaan, dan integrasi UMKM ke rantai

nilai. Pembangunan kota menengah dan pusat pertumbuhan baru dapat mengurangi konsentrasi ekonomi sekaligus membuka peluang di luar Jawa metropolitan.

Dalam jangka panjang, kunci utama adalah modal manusia dan institusi. Pendidikan berkualitas, kesehatan, perlindungan anak usia dini, kapasitas pemerintah daerah, sistem pajak yang adil, perlindungan sosial universal bertingkat, dan ekonomi rendah karbon akan menentukan apakah pertumbuhan benar-benar menghasilkan mobilitas sosial. Bonus demografi hanya menjadi bonus jika generasi produktif memiliki keterampilan, pekerjaan, dan kesehatan yang baik.

Target 2035 seharusnya bukan sekadar kemiskinan yang lebih rendah, melainkan masyarakat dengan kerentanan yang jauh lebih kecil. Indikatornya adalah lebih banyak keluarga memiliki tabungan darurat, pekerjaan terlindungi, jaminan kesehatan, akses digital, keterampilan yang relevan, dan aset produktif. Kemandirian yang tersebar luas akan membuat ekonomi nasional lebih tangguh karena konsumsi, kewirausahaan, dan investasi manusia tidak mudah runtuh ketika terjadi guncangan.

20. Kesimpulan

Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam menurunkan kemiskinan dan ketimpangan, sementara pertumbuhan ekonomi tetap relatif kuat. Namun tantangan berikutnya lebih kompleks: memastikan masyarakat tidak hanya keluar dari kemiskinan secara statistik, tetapi juga memiliki kemampuan untuk tetap berada di luar kemiskinan dan meningkatkan kehidupannya. Ini memerlukan perubahan paradigma dari penanggulangan kemiskinan yang sempit menuju pembangunan kemandirian yang multidimensional.

Kemandirian lahir dari kombinasi perlindungan dan kesempatan. Perlindungan menjaga manusia ketika risiko terjadi; kesempatan memungkinkan mereka menggunakan kapasitas untuk maju. Pekerjaan berkualitas, UMKM produktif, pendidikan, kesehatan, inklusi keuangan, aset, perlindungan sosial adaptif, digitalisasi inklusif, dan ekonomi hijau harus dipandang sebagai satu sistem. Tidak ada satu instrumen yang cukup berdiri sendiri.

Negara tetap memegang peran penting sebagai penjamin hak, penyedia layanan dasar, pembangun infrastruktur, pengatur pasar, dan pelindung terhadap risiko sistemik. Tetapi keberhasilan akhir terlihat ketika keluarga dan komunitas memiliki lebih banyak kendali atas masa depannya: mampu mengambil keputusan, memanfaatkan peluang, menghadapi risiko, menabung, berinvestasi pada anak, dan berpartisipasi dalam ekonomi dengan bermartabat. Itulah makna sosial pemulihan ekonomi.

Dengan demikian, perjalanan “dari kemiskinan menuju kemandirian” bukan slogan, melainkan agenda transformasi. Pemulihan ekonomi Indonesia akan dinilai bukan hanya dari seberapa cepat PDB bertambah, melainkan dari seberapa jauh pertumbuhan itu memperluas kebebasan, keamanan ekonomi, dan martabat manusia. Ketika pemulihan mampu mengubah penerima manfaat menjadi pelaku ekonomi yang berdaya, pekerja rentan menjadi pekerja terlindungi, usaha mikro menjadi usaha produktif, dan anak dari keluarga miskin memperoleh peluang yang lebih baik, maka pertumbuhan benar-benar menjadi pembangunan.

Pendalaman Kebijakan: Dari Program Menjadi Ekosistem Kemandirian

A. Menjaga daya beli tanpa mematikan insentif produktif

Kebijakan menjaga daya beli merupakan jembatan antara stabilisasi makro dan perlindungan sosial. Ketika harga pangan, energi, atau transportasi meningkat, rumah tangga berpendapatan rendah harus mengalokasikan proporsi pendapatan yang lebih besar untuk kebutuhan dasar. Efeknya bukan hanya

konsumsi turun, tetapi juga investasi keluarga pada pendidikan, kesehatan, dan usaha ikut berkurang. Karena itu bantuan temporer atau subsidi terarah dapat dibenarkan ketika guncangan besar terjadi. Namun desainnya harus jelas mengenai kelompok sasaran, horizon waktu, dan mekanisme evaluasi. Dukungan yang terlalu umum dapat membebani fiskal dan dinikmati kelompok yang tidak memerlukan, sedangkan dukungan yang terlalu sempit dapat meninggalkan kelompok rentan yang berada sedikit di atas ambang kemiskinan. Strategi yang lebih seimbang menggabungkan stabilisasi harga melalui sisi pasokan, bantuan pendapatan bagi kelompok bawah, dan dukungan produktif agar pendapatan riil meningkat. Pada akhirnya, daya beli yang kuat tidak dapat terus-menerus bergantung pada subsidi; ia perlu bertumpu pada produktivitas, upah, dan kesempatan ekonomi. Kualitas kebijakan juga ditentukan oleh kecepatan respons. Bantuan yang datang setelah rumah tangga menjual aset produktif sering kali terlambat mencegah kerusakan jangka panjang. Karena itu kesiapan data, kanal pembayaran, dan indikator pemicu perlu dibangun sebelum guncangan terjadi.

B. Memutus transmisi kemiskinan antargenerasi

Kemiskinan antargenerasi terjadi ketika kekurangan yang dialami orang tua diteruskan kepada anak melalui gizi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan jaringan sosial yang terbatas. Karena itu kebijakan untuk keluarga miskin harus mempunyai pandangan jangka panjang terhadap anak. Program gizi, pendidikan usia dini, kesehatan ibu, sekolah berkualitas, dan dukungan agar remaja tidak putus sekolah merupakan investasi pemulihan ekonomi yang sering hasilnya baru terlihat bertahun-tahun kemudian. Perspektif ini penting karena keluarga yang menghadapi kebutuhan mendesak hari ini mungkin secara rasional memprioritaskan konsumsi saat ini dibandingkan investasi pendidikan yang manfaatnya baru diperoleh di masa depan. Negara perlu menutup kesenjangan horizon tersebut. Intervensi antargenerasi juga harus memperhatikan aspirasi. Anak dari keluarga miskin perlu melihat adanya jalur nyata dari sekolah ke universitas, pelatihan, pekerjaan, atau kewirausahaan. Tanpa jalur tersebut, pendidikan dapat dipersepsikan sebagai biaya yang tidak memberikan hasil. Kebijakan beasiswa, mentoring, informasi karier, dan kesempatan magang dapat memperkuat jembatan aspirasi tersebut. Keberhasilan akhirnya terlihat ketika latar belakang keluarga semakin kecil pengaruhnya terhadap peluang hidup anak.

C. Mengelola urbanisasi sebagai mesin mobilitas, bukan sumber kerentanan

Urbanisasi dapat menjadi jalur mobilitas sosial karena kota menyediakan pasar kerja, pendidikan, kesehatan, dan jaringan ekonomi yang lebih luas. Namun urbanisasi yang tidak dikelola menghasilkan permukiman informal, transportasi mahal, polusi, ketidakamanan kerja, dan biaya hidup tinggi. Banyak pekerja miskin kota menghadapi paradoks: pendapatan nominal lebih tinggi tetapi sebagian besar habis untuk sewa, perjalanan, dan pangan. Karena itu agenda kemiskinan perkotaan memerlukan kebijakan perumahan terjangkau yang dekat dengan pekerjaan, transportasi publik, layanan dasar di permukiman padat, dan perlindungan pekerja informal. Pemerintah kota perlu menggunakan data spasial untuk memahami hubungan antara tempat tinggal, lokasi pekerjaan, waktu tempuh, dan biaya hidup. Pembangunan yang mendorong warga berpenghasilan rendah semakin jauh dari pusat pekerjaan dapat memperburuk kemiskinan waktu dan mengurangi kesempatan. Kota inklusif adalah kota yang memungkinkan orang berpendapatan rendah ikut menikmati aglomerasi, bukan hanya menjadi tenaga kerja berbiaya murah. Pusat layanan terpadu, pasar yang tertata, ruang publik, sekolah, puskesmas, dan transportasi harus dilihat sebagai infrastruktur produktivitas masyarakat berpendapatan rendah.

D. Memperkuat kelas rentan agar tidak jatuh kembali

Di antara kelompok miskin dan kelas menengah terdapat kelompok rentan yang pendapatannya cukup untuk berada di atas garis kemiskinan tetapi belum mempunyai bantalan yang kuat. Kelompok ini penting karena jumlahnya besar dan sangat sensitif terhadap sakit, PHK, kenaikan harga, atau bencana. Kebijakan sosial yang hanya membedakan miskin dan tidak miskin dapat mengabaikan risiko ini. Pendekatan bertingkat lebih sesuai: bantuan sosial nonkontribusi bagi kelompok paling miskin, subsidi iuran dan layanan dasar bagi kelompok rentan, serta asuransi sosial dan instrumen tabungan bagi kelompok yang lebih mampu. Dengan desain bertingkat, peningkatan pendapatan tidak langsung membuat keluarga kehilangan seluruh dukungan. Ini menciptakan jalur transisi yang lebih mulus dan mendorong formalitas. Memperkuat kelompok rentan juga penting secara makro karena keluarga yang merasa aman cenderung lebih berani berinvestasi pada pendidikan, usaha, dan perpindahan kerja yang produktif. Kebijakan perlu memantau bukan hanya siapa yang miskin hari ini, tetapi siapa yang memiliki probabilitas tinggi untuk jatuh miskin besok. Perspektif risiko seperti ini membuat sistem sosial lebih preventif.

E. Menempatkan pangan sebagai isu sosial, produktivitas, dan ketahanan

Harga dan akses pangan sangat menentukan kemiskinan karena proporsi belanja pangan pada rumah tangga berpendapatan rendah relatif besar. Kenaikan harga beras, protein, atau minyak goreng dapat segera menurunkan kualitas konsumsi dan meningkatkan tekanan pada anggaran keluarga. Karena itu stabilitas pangan tidak cukup dikelola melalui kebijakan harga. Diperlukan produktivitas pertanian, logistik, penyimpanan, diversifikasi pangan, informasi pasar, dan perlindungan petani. Kebijakan yang menekan harga konsumen tanpa memperhatikan pendapatan produsen dapat memindahkan beban kemiskinan dari konsumen ke petani. Sebaliknya, harga produsen yang sangat tinggi dapat menekan konsumen miskin. Keseimbangan memerlukan investasi pada efisiensi rantai pasok sehingga margin yang hilang karena inefisiensi dapat dikurangi. Program gizi juga perlu berfokus pada kualitas, tidak hanya kalori, karena kekurangan mikronutrien dan protein berpengaruh terhadap kesehatan dan kemampuan belajar. Dalam kerangka kemandirian, pangan bukan sekadar komoditas tetapi fondasi modal manusia. Rumah tangga yang sehat mempunyai kemampuan lebih besar untuk belajar, bekerja, dan mengakumulasi aset.

F. Menjadikan perumahan sebagai aset produktif dan sosial

Rumah bukan hanya tempat tinggal; ia dapat menjadi aset, ruang usaha, sumber keamanan, dan basis akses terhadap layanan. Keluarga yang tinggal di lingkungan rawan banjir, jauh dari transportasi, atau tanpa kepastian tenurial menghadapi biaya ekonomi yang tinggi. Program perumahan perlu menghindari pendekatan yang hanya mengejar jumlah unit. Lokasi, akses pekerjaan, sekolah, kesehatan, air bersih, dan transportasi menentukan manfaat sebenarnya. Rumah murah yang terlalu jauh dapat meningkatkan pengeluaran perjalanan dan mengurangi waktu bersama keluarga. Di daerah perdesaan, perbaikan rumah dapat dipadukan dengan sanitasi, air, energi, dan ruang produksi. Kepastian hak atas tempat tinggal juga meningkatkan rasa aman dan dapat memperkuat investasi keluarga. Namun komersialisasi aset harus dikelola agar rumah tangga tidak terdorong menggunakan rumah sebagai agunan berisiko tanpa perlindungan yang memadai. Kebijakan perumahan yang baik juga harus mempertimbangkan penyewa, karena tidak semua keluarga siap atau perlu menjadi pemilik. Sewa yang aman dan terjangkau dapat menjadi pilihan rasional bagi pekerja yang mobilitasnya tinggi.

G. Mengembangkan kebijakan mobilitas sosial berbasis siklus hidup

Kebutuhan sosial berubah sepanjang siklus hidup. Anak memerlukan gizi, kesehatan, dan pendidikan; remaja membutuhkan transisi sekolah-ke-kerja; orang dewasa memerlukan pekerjaan, perlindungan risiko, dan kesempatan peningkatan keterampilan; lansia membutuhkan jaminan pendapatan dan layanan kesehatan. Kebijakan yang terfragmentasi menurut program sering kehilangan perspektif siklus hidup ini. Sistem yang lebih baik memetakan risiko pada setiap fase dan memastikan transisi antarprogram. Ketika anak penerima bantuan pendidikan lulus, ia dapat diarahkan ke pelatihan atau penempatan kerja. Ketika pekerja kehilangan pekerjaan, ia dapat memperoleh kombinasi bantuan pendapatan dan reskilling. Ketika pekerja informal menua, ia membutuhkan perlindungan pensiun yang realistis. Pendekatan siklus hidup membantu melihat kemiskinan sebagai proses dinamis, bukan status tetap. Perspektif ini juga memperkuat pencegahan. Investasi yang dilakukan pada masa kanak-kanak dapat mengurangi kebutuhan intervensi yang jauh lebih mahal ketika seseorang dewasa. Dengan demikian kebijakan sosial yang baik menggabungkan respons terhadap masalah hari ini dengan investasi untuk menurunkan risiko di masa depan.

H. Memperkuat kapasitas fiskal untuk kebijakan sosial yang berkelanjutan

Pemulihan sosial memerlukan pembiayaan yang memadai dan berkelanjutan. Ruang fiskal tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya belanja, tetapi oleh kualitas prioritas, kemampuan menghimpun penerimaan, dan efisiensi. Program yang tumpang tindih dapat dikonsolidasikan, subsidi yang tidak tepat sasaran dapat dialihkan, dan pengadaan dapat diperbaiki. Namun efisiensi saja mungkin tidak cukup jika kebutuhan sosial meningkat. Dalam jangka panjang, basis pajak yang lebih kuat dan kepatuhan yang lebih baik memberikan ruang bagi investasi manusia. Penting pula menjaga legitimasi fiskal: masyarakat lebih bersedia mendukung pajak apabila melihat layanan publik yang berkualitas dan penggunaan dana yang transparan. Dengan demikian, reformasi fiskal dan perlindungan sosial adalah dua sisi kontrak sosial. Kebijakan sosial yang tidak memiliki sumber pembiayaan stabil akan mudah terpotong ketika kondisi ekonomi memburuk, padahal justru saat itulah kebutuhan meningkat. Pemerintah juga dapat menggunakan pendekatan penganggaran berbasis hasil sehingga program yang terbukti efektif memperoleh prioritas lebih tinggi daripada program yang hanya memiliki daya tarik politis.

I. Mengembangkan sistem layanan satu pintu berbasis kebutuhan keluarga

Bagi keluarga miskin, biaya waktu dan informasi untuk mengakses program dapat sangat besar. Mereka mungkin harus mendatangi kantor yang berbeda untuk dokumen, kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, pelatihan, dan pembiayaan. Sistem layanan satu pintu tidak berarti semua layanan dilakukan oleh satu institusi, tetapi warga memiliki titik masuk yang dapat menilai kebutuhan dan merujuk ke layanan terkait. Pendekatan case management dapat digunakan untuk rumah tangga dengan masalah kompleks. Pendamping sosial atau petugas lokal membantu menyusun rencana, menghubungkan program, dan memantau perkembangan. Teknologi dapat mendukung, tetapi relasi manusia tetap penting karena banyak masalah melibatkan kepercayaan, stigma, kesehatan mental, atau kekerasan. Sistem rujukan yang baik mengurangi risiko keluarga terjebak di antara batas-batas birokrasi. Di tingkat manajemen, sistem ini membutuhkan interoperabilitas data dan standar layanan, tetapi juga kewenangan lokal untuk menyelesaikan kasus. Ukuran keberhasilan bukan banyaknya aplikasi yang dibuat, melainkan berkurangnya friksi yang dihadapi warga.

J. Menggunakan pengadaan publik untuk memperluas kesempatan ekonomi

Belanja pemerintah bukan hanya instrumen penyediaan barang dan jasa, tetapi juga dapat menjadi pasar yang mendorong usaha lokal. Pengadaan yang dirancang dengan paket sesuai kapasitas UMKM, prosedur sederhana, pembayaran tepat waktu, dan standar kualitas yang jelas dapat membantu usaha kecil memperoleh permintaan yang stabil. Namun preferensi bagi UMKM harus disertai pengembangan kapasitas agar tidak menghasilkan ketergantungan pada pasar pemerintah. Sistem pengadaan digital juga perlu mempertimbangkan kesenjangan literasi. Pendampingan untuk registrasi, penawaran, perpajakan, dan manajemen kontrak dapat membuka akses yang selama ini dikuasai perusahaan yang lebih besar. Di tingkat daerah, pengadaan pangan sekolah, seragam, jasa kebersihan, katering, atau produk lokal dapat menjadi instrumen pembangunan ekonomi komunitas jika dilakukan secara transparan dan kompetitif. Pembayaran yang lambat harus dihindari karena usaha mikro memiliki modal kerja tipis. Dengan desain yang baik, pengadaan publik dapat berfungsi sebagai pelanggan pertama yang membantu usaha kecil membangun rekam jejak sebelum memasuki pasar yang lebih luas.

K. Menata kebijakan migrasi pekerja dan remitansi

Migrasi domestik maupun internasional dapat menjadi strategi keluarga untuk meningkatkan pendapatan. Remitansi membantu konsumsi, pendidikan, perumahan, dan investasi. Namun pekerja migran menghadapi risiko informasi, biaya perekrutan, eksploitasi, dan kehilangan perlindungan sosial. Kebijakan harus menurunkan biaya migrasi yang aman, meningkatkan informasi kontrak, memperkuat pengakuan keterampilan, dan memfasilitasi penggunaan remitansi untuk tabungan dan investasi tanpa memaksakan pilihan tertentu. Ketika pekerja kembali, pengalaman dan modal yang diperoleh dapat menjadi sumber kewirausahaan atau peningkatan keterampilan. Pemerintah daerah dapat membangun layanan reintegrasi dan jaringan alumni migran. Dengan demikian migrasi dipandang bukan hanya sebagai respons terhadap kurangnya pekerjaan lokal, tetapi juga sebagai bagian dari strategi mobilitas yang perlu dilindungi. Portabilitas jaminan sosial sangat penting agar perpindahan lokasi atau negara tidak menghapus hak yang telah dikumpulkan. Informasi yang akurat sebelum keberangkatan juga mengurangi ketergantungan pada perantara yang tidak bertanggung jawab.

L. Menjadikan kesehatan mental bagian dari pemulihan ekonomi

Tekanan ekonomi memiliki dampak psikologis. Utang, kehilangan pekerjaan, ketidakpastian, bencana, dan konflik keluarga dapat meningkatkan kecemasan dan depresi. Kondisi kesehatan mental pada gilirannya memengaruhi produktivitas, kemampuan mencari kerja, kualitas pengasuhan, dan keputusan finansial. Karena itu pemulihan ekonomi perlu memasukkan dukungan psikososial, terutama bagi kelompok yang mengalami guncangan berat. Layanan kesehatan primer dapat mengintegrasikan skrining dasar, sementara komunitas dan tempat kerja dapat menyediakan dukungan. Penting untuk mengurangi stigma agar orang mencari bantuan lebih awal. Kebijakan yang hanya memberikan pelatihan kerja kepada seseorang yang sedang mengalami depresi berat mungkin tidak efektif tanpa penanganan kesehatan. Perspektif holistik mengakui bahwa kemandirian memerlukan kesehatan fisik dan mental. Di dunia kerja, manajer juga perlu memahami bahwa keamanan psikologis, beban kerja, dan kepastian kontrak memengaruhi kesehatan mental. Pencegahan dapat mengurangi biaya absensi, turnover, dan kehilangan produktivitas.

M. Mengembangkan kontrak sosial baru untuk era ketidakpastian

Perubahan teknologi, iklim, dan geopolitik membuat jalur pekerjaan semakin tidak linear. Seseorang dapat berganti sektor beberapa kali, menjalani periode kerja mandiri, atau menggabungkan pekerjaan platform

dengan usaha kecil. Sistem sosial yang dibangun hanya untuk hubungan kerja formal permanen akan semakin banyak meninggalkan orang. Kontrak sosial baru perlu membuat perlindungan lebih portabel: jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, pensiun, dan akses pelatihan tidak hilang ketika seseorang berganti status. Pembiayaan dapat menggabungkan kontribusi pekerja, perusahaan, platform, dan negara sesuai kapasitas. Portabilitas meningkatkan mobilitas produktif karena orang tidak takut kehilangan seluruh perlindungan ketika mengambil peluang baru. Ini adalah elemen penting kemandirian pada ekonomi yang fleksibel. Pembelajaran sepanjang hayat juga perlu dianggap sebagai bagian dari kontrak sosial karena teknologi dapat membuat keterampilan usang lebih cepat. Pekerja harus mempunyai akses untuk memperbarui kompetensi tanpa menanggung seluruh biaya sendiri.

N. Mengelola politik kebijakan anti-kemiskinan dengan transparansi

Program sosial selalu berada dalam arena politik karena menyangkut distribusi sumber daya. Transparansi kriteria, data agregat, anggaran, evaluasi, dan mekanisme pengaduan membantu mengurangi patronase. Penerima manfaat harus dipandang sebagai warga dengan hak, bukan sebagai klien politik. Komunikasi publik juga perlu menjelaskan bahwa perlindungan sosial adalah investasi dalam stabilitas dan produktivitas, bukan amal. Narasi ini penting agar dukungan terhadap kebijakan sosial tidak mudah goyah ketika terjadi pergantian politik. Pada saat yang sama, program harus terbuka terhadap evaluasi independen dan kritik. Kepercayaan publik dibangun bukan dengan klaim bahwa sistem sempurna, tetapi dengan kemampuan memperbaiki kesalahan secara transparan. Publikasi indikator kinerja yang mudah dipahami dapat memperkuat pengawasan. Keterlibatan masyarakat sipil dan perguruan tinggi juga membantu menjaga diskusi tetap berbasis bukti dan mencegah program terlalu tergantung pada siklus elektoral jangka pendek.

Sintesis: Kemandirian sebagai Hasil Sistem

Rangkaian kebijakan di atas menunjukkan bahwa kemandirian ekonomi bukan atribut yang muncul karena seseorang berhenti menerima bantuan. Kemandirian merupakan hasil dari sistem yang memungkinkan rumah tangga membangun pendapatan, keterampilan, aset, perlindungan, dan jaringan. Karena itu indikator administrasi seperti keluarnya penerima dari suatu program hanya mempunyai makna jika disertai perubahan substantif pada kehidupan. Sistem yang berhasil akan mengurangi kebutuhan bantuan melalui peningkatan kapasitas, bukan melalui pembatasan akses. Dalam kerangka ini, pemerintah bertugas menciptakan enabling environment; dunia usaha menciptakan peluang produktif; institusi pendidikan memperkuat modal manusia; dan komunitas menyediakan jaringan sosial serta mekanisme kepercayaan. Setiap aktor memiliki fungsi yang tidak dapat sepenuhnya digantikan aktor lain.

Implikasi paling penting bagi manajemen publik adalah perlunya melihat rumah tangga sebagai unit perjalanan, bukan sebagai nomor dalam basis data program. Satu keluarga dapat berpindah dari tahap perlindungan ke pemulihan, lalu ke pemberdayaan dan akumulasi aset, tetapi juga dapat mundur ketika terkena guncangan. Sistem harus mampu mengenali pergerakan itu. Pendekatan longitudinal, case management untuk kasus kompleks, dan evaluasi hasil akan membantu. Dengan cara ini, pemulihan ekonomi menjadi proses membangun kemampuan, bukan sekadar mengembalikan indikator sebelum krisis. Indonesia dapat menggunakan momentum pertumbuhan untuk memperluas mobilitas sosial apabila kebijakan makro, sosial, tenaga kerja, pendidikan, kesehatan, dan wilayah bergerak dalam arah yang sama.

Penutup Analitis: Ukuran Keberhasilan yang Perlu Diubah

Jika kebijakan pembangunan masih menilai keberhasilan terutama dari pertumbuhan agregat, jumlah proyek, atau besarnya penyaluran anggaran, maka dimensi kemandirian akan mudah terpinggirkan. Ukuran

keberhasilan perlu menanyakan apakah rumah tangga memiliki pilihan yang lebih luas dibandingkan sebelumnya. Apakah pekerja dapat berpindah ke pekerjaan yang lebih produktif tanpa kehilangan perlindungan? Apakah pelaku usaha mikro dapat meningkatkan margin, memperluas pasar, dan menyisihkan tabungan? Apakah keluarga memiliki dana darurat yang membuatnya tidak perlu berutang mahal ketika sakit? Apakah anak dari keluarga berpendapatan rendah mempunyai akses pada sekolah, keterampilan, dan jaringan yang membuka mobilitas sosial? Pertanyaan seperti ini membawa kebijakan dari logika penyaluran menuju logika perubahan kehidupan. Dalam praktik, pemerintah dapat membangun dashboard kemandirian yang menggabungkan indikator pendapatan, pekerjaan, aset, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, akses digital, dan ketahanan terhadap risiko. Dashboard tersebut tidak dimaksudkan untuk menciptakan birokrasi baru, melainkan untuk memperbaiki diagnosis dan evaluasi. Ketika hasil diukur secara multidimensional, koordinasi antarsektor juga menjadi lebih rasional karena setiap program melihat kontribusinya terhadap tujuan keluarga yang sama.

Perubahan ukuran keberhasilan juga perlu terjadi di tingkat organisasi dan daerah. Perusahaan yang menerima insentif investasi dapat dievaluasi bukan hanya berdasarkan nilai investasi, tetapi juga kualitas pekerjaan, pelatihan, mobilitas pekerja, dan pengembangan pemasok lokal. Perguruan tinggi dapat menilai pengabdian masyarakat bukan hanya dari jumlah kegiatan, tetapi dari keberlanjutan kapasitas yang dibangun. Pemerintah daerah dapat menghubungkan perencanaan sosial dengan penciptaan lapangan kerja, pengembangan UMKM, konektivitas, dan layanan dasar. Dengan demikian, pemulihan sosial menjadi shared agenda, bukan urusan satu kementerian atau dinas. Pendekatan ini juga membuat kebijakan lebih tahan terhadap perubahan politik karena masyarakat dapat melihat hubungan nyata antara belanja publik dan peningkatan kemampuan hidup. Pada akhirnya, kemandirian yang luas akan memperkuat ekonomi makro itu sendiri: rumah tangga yang lebih aman berani berinvestasi pada pendidikan dan usaha; pekerja yang sehat lebih produktif; usaha kecil yang berkembang memperluas basis pajak dan pekerjaan; serta komunitas yang tangguh lebih cepat pulih ketika guncangan terjadi. Inilah siklus kebajikan antara keadilan sosial dan dinamika ekonomi.

Lampiran Analitis: Dua Belas Prinsip Pemulihan Sosial yang Berorientasi Kemandirian

1. Dahulukan manusia daripada indikator agregat

Pertumbuhan adalah sarana. Evaluasi harus menanyakan siapa yang memperoleh manfaat, bagaimana distribusinya, dan apakah kelompok rentan mampu mengubah tambahan aktivitas ekonomi menjadi peningkatan kualitas hidup. Prinsip ini menempatkan kemandirian sebagai kapasitas yang dibangun secara bertahap melalui institusi, bukan sebagai kewajiban individual yang dilepaskan dari konteks sosial. Dalam praktik, penerapannya membutuhkan koordinasi lintas sektor, indikator hasil, dan ruang belajar agar kebijakan dapat diperbaiki secara terus-menerus.

2. Lindungi sebelum memberdayakan

Rumah tangga yang sedang mengalami krisis sulit mengambil keputusan produktif. Menjaga pangan, kesehatan, dan pendidikan memberi ruang psikologis dan ekonomi untuk melakukan investasi masa depan. Prinsip ini menempatkan kemandirian sebagai kapasitas yang dibangun secara bertahap melalui institusi, bukan sebagai kewajiban individual yang dilepaskan dari konteks sosial. Dalam praktik, penerapannya

membutuhkan koordinasi lintas sektor, indikator hasil, dan ruang belajar agar kebijakan dapat diperbaiki secara terus-menerus.

3. Hubungkan bantuan dengan kesempatan

Program tunai perlu mempunyai rujukan yang nyata menuju pelatihan, pekerjaan, layanan usaha, kesehatan, atau pendidikan. Keterhubungan ini harus memudahkan, bukan menambah persyaratan administratif. Prinsip ini menempatkan kemandirian sebagai kapasitas yang dibangun secara bertahap melalui institusi, bukan sebagai kewajiban individual yang dilepaskan dari konteks sosial. Dalam praktik, penerapannya membutuhkan koordinasi lintas sektor, indikator hasil, dan ruang belajar agar kebijakan dapat diperbaiki secara terus-menerus.

4. Fokus pada produktivitas, bukan sekadar kredit

Pembiayaan hanya efektif jika usaha mempunyai pasar, teknologi, manajemen, dan margin yang sehat. Peningkatan produktivitas membuat pembiayaan menjadi berkelanjutan. Prinsip ini menempatkan kemandirian sebagai kapasitas yang dibangun secara bertahap melalui institusi, bukan sebagai kewajiban individual yang dilepaskan dari konteks sosial. Dalam praktik, penerapannya membutuhkan koordinasi lintas sektor, indikator hasil, dan ruang belajar agar kebijakan dapat diperbaiki secara terus-menerus.

5. Ukur stabilitas, bukan hanya status

Keluar dari garis kemiskinan pada satu survei belum tentu berarti aman. Kemandirian memerlukan ketahanan terhadap guncangan dan kemampuan mempertahankan kesejahteraan dari waktu ke waktu. Prinsip ini menempatkan kemandirian sebagai kapasitas yang dibangun secara bertahap melalui institusi, bukan sebagai kewajiban individual yang dilepaskan dari konteks sosial. Dalam praktik, penerapannya membutuhkan koordinasi lintas sektor, indikator hasil, dan ruang belajar agar kebijakan dapat diperbaiki secara terus-menerus.

6. Bangun aset dan tabungan

Aset memperluas pilihan. Program yang membantu keluarga menabung, memiliki alat produksi, memperoleh rumah yang aman, atau meningkatkan pendidikan dapat mengurangi kerentanan lebih dalam. Prinsip ini menempatkan kemandirian sebagai kapasitas yang dibangun secara bertahap melalui institusi, bukan sebagai kewajiban individual yang dilepaskan dari konteks sosial. Dalam praktik, penerapannya membutuhkan koordinasi lintas sektor, indikator hasil, dan ruang belajar agar kebijakan dapat diperbaiki secara terus-menerus.

7. Jadikan pekerjaan layak inti kebijakan industri

Setiap strategi investasi dan hilirisasi perlu dinilai dari kemampuannya menciptakan pekerjaan berkualitas, mengembangkan pemasok lokal, dan menaikkan kompetensi pekerja. Prinsip ini menempatkan kemandirian sebagai kapasitas yang dibangun secara bertahap melalui institusi, bukan sebagai kewajiban individual yang dilepaskan dari konteks sosial. Dalam praktik, penerapannya membutuhkan koordinasi lintas sektor, indikator hasil, dan ruang belajar agar kebijakan dapat diperbaiki secara terus-menerus.

8. Gunakan digitalisasi secara inklusif

Teknologi harus memperpendek jarak warga dengan layanan. Selalu sediakan jalur bantuan manusia, akses bagi disabilitas, dan perlindungan data. Prinsip ini menempatkan kemandirian sebagai kapasitas yang

dibangun secara bertahap melalui institusi, bukan sebagai kewajiban individual yang dilepaskan dari konteks sosial. Dalam praktik, penerapannya membutuhkan koordinasi lintas sektor, indikator hasil, dan ruang belajar agar kebijakan dapat diperbaiki secara terus-menerus.

9. Perlakukan perempuan dan care economy sebagai isu ekonomi

Penitipan anak, kesehatan reproduksi, transportasi aman, dan pembagian pekerjaan perawatan menentukan partisipasi kerja dan produktivitas perempuan. Prinsip ini menempatkan kemandirian sebagai kapasitas yang dibangun secara bertahap melalui institusi, bukan sebagai kewajiban individual yang dilepaskan dari konteks sosial. Dalam praktik, penerapannya membutuhkan koordinasi lintas sektor, indikator hasil, dan ruang belajar agar kebijakan dapat diperbaiki secara terus-menerus.

10. Desentralisasikan solusi, bukan standar hak

Hak dasar harus berlaku nasional, tetapi cara implementasi dapat menyesuaikan kondisi lokal. Daerah memerlukan kapasitas, data, dan ruang inovasi. Prinsip ini menempatkan kemandirian sebagai kapasitas yang dibangun secara bertahap melalui institusi, bukan sebagai kewajiban individual yang dilepaskan dari konteks sosial. Dalam praktik, penerapannya membutuhkan koordinasi lintas sektor, indikator hasil, dan ruang belajar agar kebijakan dapat diperbaiki secara terus-menerus.

11. Evaluasi untuk belajar

Evaluasi bukan hanya audit kepatuhan. Ia harus menjawab apa yang berhasil, untuk siapa, dalam kondisi apa, dan bagaimana biaya dibandingkan hasil. Prinsip ini menempatkan kemandirian sebagai kapasitas yang dibangun secara bertahap melalui institusi, bukan sebagai kewajiban individual yang dilepaskan dari konteks sosial. Dalam praktik, penerapannya membutuhkan koordinasi lintas sektor, indikator hasil, dan ruang belajar agar kebijakan dapat diperbaiki secara terus-menerus.

12. Siapkan sistem untuk guncangan berikutnya

Pemulihan terbaik adalah yang sekaligus memperkuat ketahanan. Sistem data, pembayaran, jaminan sosial, dan respons bencana perlu siap sebelum krisis berikutnya terjadi. Prinsip ini menempatkan kemandirian sebagai kapasitas yang dibangun secara bertahap melalui institusi, bukan sebagai kewajiban individual yang dilepaskan dari konteks sosial. Dalam praktik, penerapannya membutuhkan koordinasi lintas sektor, indikator hasil, dan ruang belajar agar kebijakan dapat diperbaiki secara terus-menerus.

Glossarium

Agency: Kemampuan individu atau kelompok untuk membuat pilihan dan bertindak atas pilihan tersebut.

Akumulasi aset: Proses membangun kepemilikan sumber daya ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan atau menahan guncangan.

Graduasi: Transisi penerima program dari ketergantungan pada bantuan menuju kondisi ekonomi yang lebih stabil dan mandiri.

Inklusi keuangan: Akses dan penggunaan layanan keuangan yang aman, terjangkau, dan sesuai kebutuhan.

Just transition: Transisi menuju ekonomi hijau yang memperhatikan perlindungan pekerja dan komunitas terdampak.

Kapabilitas: Kebebasan substantif untuk mencapai keadaan hidup yang dianggap bernilai.

Kemiskinan kronis: Kemiskinan yang bertahan lama dan sering diwariskan lintas generasi.

Kemiskinan multidimensional: Kemiskinan yang mencakup berbagai deprivasi selain kekurangan pendapatan.

Kemiskinan transien: Kemiskinan sementara yang muncul akibat guncangan seperti kehilangan pekerjaan, sakit, atau bencana.

Kemandirian ekonomi: Kemampuan rumah tangga mengelola penghidupan, memanfaatkan peluang, dan menghadapi risiko tanpa ketergantungan yang berlebihan pada bantuan.

Ketahanan rumah tangga: Kemampuan menyerap, beradaptasi, dan pulih dari guncangan ekonomi atau sosial.

Modal manusia: Pengetahuan, keterampilan, kesehatan, dan kapasitas produktif yang melekat pada manusia.

Pekerjaan layak: Pekerjaan produktif yang memberikan penghasilan wajar, perlindungan, hak, dan kondisi kerja yang aman.

Perlindungan sosial adaptif: Sistem perlindungan sosial yang dapat merespons perubahan kebutuhan dan guncangan secara cepat.

Tapering benefit: Pengurangan manfaat bantuan secara bertahap ketika pendapatan penerima meningkat.

UMKM: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; sektor penting bagi pekerjaan dan ekonomi rakyat.

Upskilling: Peningkatan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan pada pekerjaan atau bidang yang sama.

Reskilling: Pengembangan keterampilan baru untuk berpindah ke pekerjaan atau fungsi yang berbeda.

Vendor lock-in: Ketergantungan yang sulit diputus terhadap penyedia teknologi tertentu.

Vulnerability/kerentanan: Risiko relatif tinggi untuk mengalami penurunan kesejahteraan ketika terjadi guncangan.

Daftar Pustaka

- Akire, S., & Foster, J. (2011). Counting and multidimensional poverty measurement. *Journal of Public Economics*, 95(7-8), 476-487. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2010.11.006>
- Barrientos, A. (2012). Social transfers and growth: What do we know? What do we need to find out? *World Development*, 40(1), 11-20. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2011.05.012>
- Badan Pusat Statistik. (2025). Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2025. BPS-Statistics Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2026a). Gini ratio September 2025 tercatat sebesar 0,363. BPS-Statistics Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2026b). Persentase penduduk miskin September 2025 turun menjadi 8,25 persen. BPS-Statistics Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2026c). Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen. BPS-Statistics Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2026d). Ekonomi Indonesia triwulan I-2026 tumbuh 5,61 persen (y-on-y). BPS-Statistics Indonesia.
- Banerjee, A. V., & Duflo, E. (2007). The economic lives of the poor. *Journal of Economic Perspectives*, 21(1), 141-167. <https://doi.org/10.1257/jep.21.1.141>

-
- Banerjee, A., Duflo, E., Goldberg, N., Karlan, D., Osei, R., Pariente, W., Shapiro, J., Thuysbaert, B., & Udry, C. (2015). A multifaceted program causes lasting progress for the very poor: Evidence from six countries. *Science*, 348(6236), 1260799. <https://doi.org/10.1126/science.1260799>
- Deaton, A. (2005). Measuring poverty in a growing world (or measuring growth in a poor world). *The Review of Economics and Statistics*, 87(1), 1-19. <https://doi.org/10.1162/0034653053327612>
- Dercon, S. (2004). Growth and shocks: Evidence from rural Ethiopia. *Journal of Development Economics*, 74(2), 309-329. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2004.01.001>
- Foster, J., Greer, J., & Thorbecke, E. (1984). A class of decomposable poverty measures. *Econometrica*, 52(3), 761-766. <https://doi.org/10.2307/1913475>
- Kabeer, N. (1999). Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women's empowerment. *Development and Change*, 30(3), 435-464. <https://doi.org/10.1111/1467-7660.00125>
- Karlan, D., Osei, R., Osei-Akoto, I., & Udry, C. (2014). Agricultural decisions after relaxing credit and risk constraints. *The Quarterly Journal of Economics*, 129(2), 597-652. <https://doi.org/10.1093/qje/qju002>
- Morduch, J. (1995). Income smoothing and consumption smoothing. *Journal of Economic Perspectives*, 9(3), 103-114. <https://doi.org/10.1257/jep.9.3.103>
- Ravallion, M. (2012). Why don't we see poverty convergence? *American Economic Review*, 102(1), 504-523. <https://doi.org/10.1257/aer.102.1.504>
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- World Bank. (2023). *Indonesia poverty assessment: Pathways towards economic security*. World Bank.
- World Bank. (2025). *Indonesia economic prospects*. World Bank.
- Zimmerman, F. J., & Carter, M. R. (2003). Asset smoothing, consumption smoothing and the reproduction of inequality under risk and subsistence constraints. *Journal of Development Economics*, 71(2), 233-260. [https://doi.org/10.1016/S0304-3878\(03\)00028-2](https://doi.org/10.1016/S0304-3878(03)00028-2)

Catatan Data Kontekstual

Angka kemiskinan September 2025, gini ratio September 2025, pertumbuhan ekonomi 2025, pertumbuhan triwulan I-2026, serta ketenagakerjaan Agustus 2025 mengacu pada rilis resmi Badan Pusat Statistik. Data digunakan sebagai konteks untuk analisis kebijakan sosial dan bukan sebagai proyeksi.